



BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN MEDAN

TAHUN 2025



LAPORAN KEUANGAN

UNTUK PERIODE 30 JUNI 2025
KODE SATKER 238741

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBERDAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

**Badan Riset dan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan
Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan**

Kelurahan Nelayan Indah – Kec. Medan Labuhan
Telp. (061) 88800010
Fax. (061) 88800012
Email . bpppmedan@yahoo.com
Kotak Pos. 20253

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan adalah salah satu entitas yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan mengacu pada dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. Informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggung jawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Medan, 10 Juli 2024

Kepala Balai,



DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan Laporan Keuangan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	4
II. Neraca	6
III. Laporan Operasional	7
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	9
V. Catatan atas Laporan Keuangan	10
A. Penjelasan Umum	10
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	30
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	37
D. Penjelasan atas Pos – Pos Laporan Operasional	51
E. Penjelasan atas Pos – Pos Laporan Perubahan Ekuitas	58
F. Pengungkapan Penting Lainnya	59
VI. Lampiran dan Daftar	

DAFTAR TABEL DAN LAMPIRAN

	Hal
Tabel 1	1
Tabel 2	2
Tabel 3	25
Tabel 4	27
Tabel 5	30
Tabel 6	31
Tabel 7	31
Tabel 8	32
Tabel 9	33
Tabel 10	34
Tabel 11	34
Tabel 12	35
Tabel 13	35
Tabel 14	35
Tabel 15	37
Tabel 16	38
Tabel 17	38
Tabel 18	39
Tabel 19	40
Tabel 20	40
Tabel 21	41
Tabel 22	41
Tabel 23	42
Tabel 24	45
Tabel 25	46
Tabel 26	47
Tabel 27	48

Tabel 28	:	Rincian Aset Lainnya	48
Tabel 29	:	Rincian Aset tak Berwujud	49
Tabel 30	:	Rincian Utang kepada Pihak Ketiga	49
Tabel 31	:	Rincian Utang yang belum ditagihkan	50
Tabel 32	:	Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak	51
Tabel 33	:	Rincian Belanja Pegawai	52
Tabel 34	:	Beban Persediaan	52
Tabel 35	:	Beban Rincian Jasa	53
Tabel 36	:	Rincian Beban Pemeliharaan	53
Tabel 37	:	Rincian Beban Perjalanan Dinas	54
Tabel 38	:	Rincian Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat	54
Tabel 39	:	Rincian Beban Bantuan Sosial	54
Tabel 40	:	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi	55
Tabel 41	:	Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	55
Tabel 42	:	Rincian Beban Lain-lain	56
Tabel 43	:	Rincian Kegiatan Non Operasional	56
Tabel 44	:	Rincian Pos Luar Biasa	57
Lampiran	:	Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap	
A1			



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN MEDAN**

JALAN KHAIDIR KELURAHAN NELAYAN INDAH
KECAMATAN MEDAN LABUHAN - MEDAN 20253
TELEPON : (061) 88800010 FAX : (061) 88800012

LAMAN: www.kkp.go.id/brsdm/bp3medan SURAT ELEKTRONIK : bp3.medan@kkp.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan (Unaudited) yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Medan, 10 Juli 2025

Kepala Balai,

Ahmad Ridloudin, S.T., M.P.
NIP19790515 200502 1 001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan Semester I TA 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan PMK Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 30 Juni 2025.

Realisasi Pendapatan Negara sampai 30 Juni 2025 adalah senilai Rp41.339.992,00 atau mencapai 9.19 persen dari estimasi pendapatannya senilai Rp450.001.000,00.

Realisasi Belanja Negara sampai 30 Juni 2025 adalah senilai Rp36.309.044.858,00 atau mencapai 51.90 persen dari alokasi anggaran senilai Rp69.954.144.000,00.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Semester I TA 2025 dapat disajikan sebagai berikut :

*Tabel 1
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2025 dan 2024
(dalam Rupiah)*

Uraian	2025			2024
	Anggaran	Realisasi	% Real. Thd Anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	450.001.000,00	41.339.992,00	9.19	374.338.644,00
Belanja Negara	69.954.144.000,00	36.309.044.858,00	51.90	42.044.982.364,00

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 30 Juni 2025. Nilai Aset per 30 Juni 2025 dicatat dan disajikan senilai Rp43.482.743.163,00 yang terdiri dari : Aset Lancar senilai Rp44.523.900,00 Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) senilai Rp43.438.219.263,00. Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) senilai Rp00 dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) senilai Rp0,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing senilai Rp1.972.996.343,00 dan Rp41.509.746.820,00. Ringkasan Neraca TA 2025 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 2

Ringkasan Neraca 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 (dalam Rupiah)

Uraian	30-Jun-25	31-Des-24	Kenaikan / Penurunan	
			Rp	%
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	42.000.000	-	42.000.000	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-	-	-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	-	-	-	-100,00
Persediaan	2.523.900	1.671.160	852.740	182.86
JUMLAH ASET LANCAR	44.523.900	1.671.160	42.852.740	721.05.00
ASET TETAP				
Tanah	23.070.382.448	23.070.382.448	-	0,00
Peralatan dan Mesin	20.274.862.885	20.274.862.885	-	0,00
Gedung dan Bangunan	22.696.410.007	22.696.410.007	-	0,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.480.462.700	5.480.462.700	-	0,00
Aset Tetap Lainnya	62.748.900	62.748.900	-	1,00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(28.146.647.677)	(27.565.774.274)	-	0,00
JUMLAH ASET TETAP	43.438.219.263	44.019.092.666	-	0,00
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	-	346.955.000	-	#DIV/0!
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI	-	(346.966.000)	-	#DIV/0!
JUMLAH ASET LAINNYA	-	-	-	-
JUMLAH ASET	43.482.743.163	44.020.763.826	42.852.740	0,10
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	1.930.996.343	40.841.074	1.890.155.269	4.085.34
Utang yang belum ditagihkan	42.000.000	-	42.000.000	0,00
Uang Muka dari KPPN	-	-	-	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1.972.996.343	40.841.074	1.932.155.269	4.085.19
JUMLAH KEWAJIBAN	1.972.996.343	40.841.074	1.974.155.269	4.085.19
EKUITAS				
Ekuitas	41.509.746.820	43.979.922.752	(2.470.175.932)	(2.83)
JUMLAH EKUITAS	41.509.746.820	43.979.922.752	(2.470.175.932)	(2.83)
JUMLAH EKUITAS	41.509.746.820	43.979.922.752	(2.470.175.932)	(2.83)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	43.482.743.163	44.020.763.826	(538.020.663)	(1.84)

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan / LO, beban, Surplus/Defisit dari operasi, surplus atau defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa dan surplus atau defisit / LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan – LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2025 adalah senilai Rp41.339.980,00 sedangkan jumlah beban adalah senilai Rp38.194.836.987,00 sehingga terdapat defisit dari kegiatan operasional senilai Rp(38.153.497.007,00) Surplus/Defisit kegiatan non operasional lainnya senilai Rp12,00 dan Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa senilai Rp(38.153.496.995,00) sehingga Surplus/Defisit – LO senilai Rp(38.153.496.995,00).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas Tahun pelaporan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya. Ekuitas pada Tanggal 01 Januari 2025 adalah senilai Rp43.979.922.752,00 dikurangi defisit – LO senilai Rp(38.153.496.995,00), Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas senilai Rp0,00 dan ditambah transaksi antar entitas senilai Rp36.267.704.866,00 dan Kenaikan/Penurunan Ekuitas senilai Rp(1.885.792.129,00) sehingga ekuitas entitas pada 30 Juni 2025 adalah senilai Rp42.094.130.623,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2025, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN (BPPP) MEDAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025 DAN 30 JUNI 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	30 JUNI 2025		%	30 JUNI 2024
	ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	-	-	-	-
I. Pendapatan Perpjakan	-	-	-	-
1. Pajak Dalam Negeri	-	-	-	-
2. Pajak Perdagangan Internasional	-	-	-	-
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	450.001.000	41.339.992	9,19	374.338.644
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	-	-	-	-
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	-	-	-	-
3. Pendapatan BLU	-	-	-	-
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	450.001.000	41.339.992	9,19	374.338.644
III. Pendapatan Hibah	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	450.001.000	41.339.992	9,19	374.338.644
B. Belanja Negara	-	-	-	-
I. Belanja Pemerintah Pusat	69.954.144.000	36.309.044.858	51,90	42.044.982.364
1. Belanja Pegawai	57.496.480.000	32.143.717.743	55,91	31.599.693.179
2. Belanja Barang	12.376.664.000	4.165.327.115	33,65	9.790.552.185
3. Belanja Modal	81.000.000	-	-	654.737.000
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	-	-	-	-
5. Belanja Subsidi	-	-	-	-
6. Belanja Hibah	-	-	-	-
7. Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
8. Belanja Lain-lain	-	-	-	-

URAIAN	30 JUNI 2025		%	30 JUNI 2024
	ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa				
1. Transfer ke Daerah	-	-	-	-
a. Dana Perimbangan	-	-	-	-
1. Dana Transfer Umum	-	-	-	-
a. Dana Bagi Hasil	-	-	-	-
b. Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
2. Dana Transfer Khusus	-	-	-	-
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	-	-	-	-
Fisik	-	-	-	-
b. Dana Insentif Daerah	-	-	-	-
c. Dana Keistimewaan DIY	-	-	-	-
d. Dana Otomatis Khusus	-	-	-	-
2. Dana Desa	-	-	-	-
3. Hibah Kepada Daerah	-	-	-	-
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	69.954.144.000	36.309.044.858	52	42.044.982.364
C. PEMBIAYAAN				

II. NERACA

**BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN (BPPP) MEDAN
NERACA**

30 JUNI 2025 DENGAN 31 DESEMBER 2024

(dalam Rp)

URAIAN	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
	2025	2024	JUMLAH	%
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	42.000.000	0	42.000.000	0
Kas di Bendahara Penerimaan	-	0	-	
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	0	-	-	(100,00)
Persediaan	2.523.900	1.671.160	852.740	182.86
JUMLAH ASET LANCAR	44.523.900	1.671.160	42.852.740	721.05
ASET TETAP				
Tanah	23.070.382.448	23.070.382.448	0	0
Peralatan dan Mesin	20.274.862.885	20.274.862.885	-	0,00
Gedung dan Bangunan	22.696.410.007	22.696.410.007	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.480.462.700	5.480.462.700	0	
Aset Tetap Lainnya	62.748.900	62.748.900	0	
AKUMULASI PENYUSUTAN	(28.146.647.677)	(27.565.774.274)	(580.873.403)	
JUMLAH ASET TETAP	43.438.219.263	44.019.092.666	(580.873.403)	(1,34)
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	-	346.955.000	(346.955.000)	-
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI				
ASET LAINNYA	-	(346.955.000)	346.955.000	-
JUMLAH ASET LAINNYA	-	-	-	-
JUMLAH ASET	43.482.743.163	44.020.763.826	816.501.580	1.84
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	1.930.996.343	40.841.074	1.890.155.269	4.085.34
Utang Yang Belum Ditagihkan	-	-	-	-
Uang Muka dari KPPN	42.000.000	-	42.000.000	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1.972.996.343	40.841.074	1.932.155.269	4.508.19
JUMLAH KEWAJIBAN	1.972.996.343	40.841.074	1.974.155.269	4.508.19
EKUITAS				
Ekuitas	41.509.746.820	43.979.922.752	(2.470.175.932)	(2.83)
JUMLAH EKUITAS	41.509.746.820	43.979.922.752	(2.470.175.932)	(2.83)
JUMLAH EKUITAS	41.509.746.820	43.979.922.752	(2.470.175.932)	(2.83)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	43.482.743.163	44.020.763.826	(538.020.663)	(1.84)

III. LAPORAN OPERASIONAL

**BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN (BPPP) MEDAN
LAPORAN OPERASIONAL
30 JUNI 2025 DENGAN 30 JUNI 2024**

(dalam Rp)

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	-	-	-	-
PENDAPATAN OPERASIONAL	-	-	-	-
PENDAPATAN PERPAJAKAN	-	-	-	-
Pendapatan Pajak Penghasilan	-	-	-	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	-	-	-	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-	-
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-	-	-	-
Pendapatan Cukai	-	-	-	-
Pendapatan Pajak Lainnya	-	-	-	-
Pendapatan Bea Masuk	-	-	-	-
Pendapatan Bea Keluar	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Perpajakan	-	-	-	-
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	-	-	-	-
Pendapatan Sumber Daya Alam	-	-	-	-
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	-	-	-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	41.339.980,00	394.344.000,00	(353.004.020,00)	401.201
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	41.339.980,00	394.344.000,00	(353.004.020,00)	401.201
PENDAPATAN HIBAH	-	-	-	-
Pendapatan Hibah	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Hibah	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan	41.339.980	394.344.000	(353.004.020)	401.201
BEBAN OPERASIONAL	-	-	-	-
Beban Pegawai	34.074.714.086	33.522.534.698	552.179.388	18.761
Beban Persediaan	9.554.660	52.043.994	(42.489.334)	(5.845)
Beban Barang dan Jasa	3.985.077.218	7.288.138.125	(3.303.060.907)	10.325
Beban Pemeliharaan	74.196.167	412.696.796	(338.500.629)	(50.986)
Beban Perjalanan Dinas	54.805.256	2.036.284.816	(1.981.479.560)	161.533
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	-	-	-	-
Beban Bunga	-	-	-	-

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	-	-	-	-
Beban Hibah	-	-	-	-
Beban Bantuan Sosial	-	-	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	580.873.403	623.063.640	42.190.237	(100)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	-	168.500	(100)
Beban Transfer	-	-	-	-
Beban Lain-Lain	-	-	-	-
JUMLAH BEBAN	38.779.220.790	43.934.762.069	5.155.541.279	16.794
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	- 38.737.880.810	- 43.585.418.069	4.847.537.259	16.083
KEGIATAN NON OPERASIONAL	-	-	-	-
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-	(100)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-	(100)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-	-
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	12	203.384.644	203.384.632	36.486
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	12	203.384.644	203.384.632	36.486
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	-	-
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	12	203.384.644	203.384.632	(80.403)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN (BPPP) MEDAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
30 JUNI 2025 DENGAN 30 JUNI 2024

(dalam Rp)

Uraian	Catatan	30 Juni 2025	30 Juni 2024
EKUITAS AWAL	E.1	43.979.922.752,00	44.367.937.329,00
SURFLUS/ DEFISIT LO	E.2	(38.737.880.798,00)	(43.378.985.425,00)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	0	0
Penyesuaian Nilai Aset	E.4	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E.5	0	0
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.6	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.7	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap / Lainnya Non Revaluasi	E.8	0	0
Lain-lain	E.9	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.10	36.267.704.866,00	41.670.643.720,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.11	(2.470.175.932,00)	(1.708.341.705,00)
EKUITAS AKHIR		41.509.746.820,00	42.659.595.624,00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan

*Dasar
Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

1.1. Kondisi umum

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

Sejarah berdirinya BPPP Medan dimulai pada tahun 1961 dengan nama Sekolah Perikanan Laut (SPL) Belawan, pada tahun 1962 berubah menjadi Sekolah Usaha Perikanan Pertama (SUPP) Belawan. Kemudian pada tahun 1972 SUPP Belawan berubah nama menjadi *Training Center Perikanan* (TC Perikanan) Belawan, dan pada tahun 1975 TC Perikanan Belawan dikembangkan dan dirubah namanya menjadi Pangkalan Pengembangan Pola Keterampilan Penangkapan Perairan Pantai (P3KP3) Belawan. Pada tahun 1978 P3KP3 Belawan diganti nama dengan Balai Keterampilan Penangkapan Ikan (BKPI) Belawan. Pada tahun 2001, Balai Keterampilan Penangkapan Ikan berubah nama menjadi Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan (BPPP) Medan, terakhir pada tahun 2017 sampai sekarang menjadi Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan.

Sebagai salah satu UPT bidang Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan, BPPP Medan bertanggung jawab untuk membantu kelancaran dan keberhasilan tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam pelaksanaan pembangunan Kelautan dan Perikanan, dalam hal ini pembangunan sumberdaya manusia Kelautan dan Perikanan.

Pembangunan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan empat pilar pembangunan yaitu pro-poor (pengetasan kemiskinan), pro-job (penyerapan tenaga kerja), pro-growth (pertumbuhan) dan pro-environment (pemulihian dan pelestarian), dimana sektor Kelautan dan Perikanan merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional. Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis dalam pelaksanaan pembangunan.

1.1.1 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nornor : 87/PERMEN-KP/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan, bahwa BPPP Medan mempunyai tugas pokok yaitu Melaksanakan Penyusunan Baban Kebijakan, Program dan Anggaran, Penyelenggaraan, Evaluasi dan Pelaporan Pelatihan dan Penyuluhan di Bidang Kelautan dan Perikanan.

Dalam melaksanakan tugas pokok BPPP Medan menyelenggarakan fungsi-fungsi yaitu :

1. Penyusunan Bahan Kebijakan Pelatihan dan Penyuluhan;
2. Penyusunan Program dan Anggaran serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelatihan dan penyuluhan;
3. Pelatihan Teknis dan manajerial di bidang perikanan;
4. Penyusunan materi, metodologi dan pelaksanaan penyuluhan perikanan;
5. Pemantauan kebutuhan pembentukan jaringan pengembangan tenaga teknis dan manajerial di bidang perikanan;
6. Pengelolaan prasarana dan sarana pelatihan dan penyuluhan;
7. Pengembangan dan fasilitas kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
8. Penyusunan kebutuhan peningkatan kapasitas Penyuluh Pegawai Negeri Sipil (PNS), swadaya, dan swasta;
9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Dalam Mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Balai Pelatihan dan Perikanan (BPPP) Medan, memiliki Pejabat Struktural yaitu :

1. Kepala Sub. Bagian Tata Usaha
2. Kepala Seksi Program, Monitoring dan Evaluasi
3. Kepala Seksi Pelatihan
4. Kepala Seksi Penyuluhan

Sub. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan Administrasi Kepegawaian, Keuangan, Persuratan, Perlengkapan dan urusan rumah tangga (Umum) serta pengelolaan sarana dan prasarana pelatihan dan penyuluhan perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya Sub. Bagian Tata Usaha dibantu 3 (tiga) orang pelaksana antara lain :

1. Pelaksana Urusan Kepegawaian
2. Pelaksana Urusan Keuangan
3. Pelaksana Urusan Perlengkapan Rumah Tangga dan Umum

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah konsep manusia sebagai subyek atau pelaku yang diharapkan memiliki ilmu dan bermartabat tinggi karena BPPP Medan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya membutuhkan sumber daya manusia yang mampu mendukung pelaksanaan unsur administrasi dan unsur teknis dengan baik. Dalam hal ini BPPP Medan didukung oleh pegawai sebanyak 55 (lima puluh lima) orang, terdiri dari 45 (empat puluh lima) orang PNS, PPPK sebanyak 2 (dua) orang, PPNPN sebanyak 4 (empat) orang dan PJLP sebanyak 4 (empat) orang. Jumlah Tenaga kerja yang proporsional yang dipetakan melalui Analisa Jabatan telah terwujud dalam komposisi jabatan saat ini.

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 403/MENSJ/KP.431/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil, maka Penyuluhan Perikanan masuk ke Satuan Administrasi Pangkalan (Satminkal) Medan yang terdiri dari 5 (lima) Provinsi yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau dan Provinsi

Kepulauan Riau. Daftar Pegawai Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan.

Dalam mendukung kinerja BPPP Medan, kualitatif SDM yang memadai sangat diperlukan khususnya untuk pengelolaan dalam fungsi kediklatan. Tabel berikut ini merupakan gambaran Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh BPPP berdasarkan tingkat pendidikannya.

Tabel 2. Kualitatif Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Status Kepegawaian					Jumlah
		PNS Balai	PPNPN	PJLP	Penyuluhan	PPPK	
1	S2	7	-	-	11	-	18
2	S1/D4	25	3	1	142	99	270
3	D-IV	-	-	-	25	-	25
4	D-III	-	-	1	33	-	34
5	D-I	-	1	-	-	-	1
6	SLTA	12	-	1	22	-	35
7	SLTP	-	-	-	-	-	-
8	SD	1	-	1	-	-	2
Jumlah		45	4	4	233	99	385

2.2.2. Seksi Program, Evaluasi dan Monitoring

Seksi Program, Evaluasi dan Monitoring merupakan salah satu seksi yang ada pada struktur organisasi Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan. Adapun tugas Seksi Program, Monitoring dan Evaluasi pada tahun 2025 sebagai berikut :

1. Melakukan penyiapan bahan kebijakan
2. Penyusunan program dan anggaran
3. Pengelolaan kinerja
4. Monitoring dan evaluasi pelatihan dan penyuluhan
5. Penyusunan laporan

2.2.3. Seksi Pelatihan

Seksi Pelatihan pada Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan mempunyai tugas melakukan penyiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan administrasi.

Adapun kegiatan yang telah dilakukan adalah:

1. Melaksanakan kegiatan pelatihan Aparatur
2. Melaksanakan kegiatan pelatihan Non Aparatur/masyarakat
3. Membuat juknis pelaksanaan pelatihan

Pada tahun 2025 Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan tidak melaksanakan pelatihan baik bagi aparatur maupun non aparatur /masyarakat dikarenakan anggaran diblokir karena adanya efisiensi anggaran.

2.2.4. Seksi Penyuluhan

Pada tahun 2025 Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan telah ditetapkan sebagai Satuan Administrasi Pangkalan (Satminkal) Penyuluhan Perikanan oleh Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Seksi Penyuluhan mempunyai tugas yaitu menyiapkan bahan pengembangan penyuluhan, dan pelaksanaan penyuluhan, serta penyusunan kebutuhan peningkatan kapasitas penyuluhan PNS, swadaya dan swasta.

Jumlah Penyuluhan Perikanan yang berada di Satminkal BPPP Medan adalah 154 orang yang berasal dari 5 (lima) Provinsi yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau.

2.2.5. Kelompok Fungsional Widya Iswara dan Instruktur

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas yaitu melaksanakan kegiatan pelatihan dan penyuluhan serta kegiatan lainnya yang sesuai dengan keahlian masing-masing. Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan memiliki kelompok jabatan fungsional yaitu Kelompok Fungsional Widya Iswara dan kelompok fungsional Instruktur.

A. Widya swara BPPP Medan

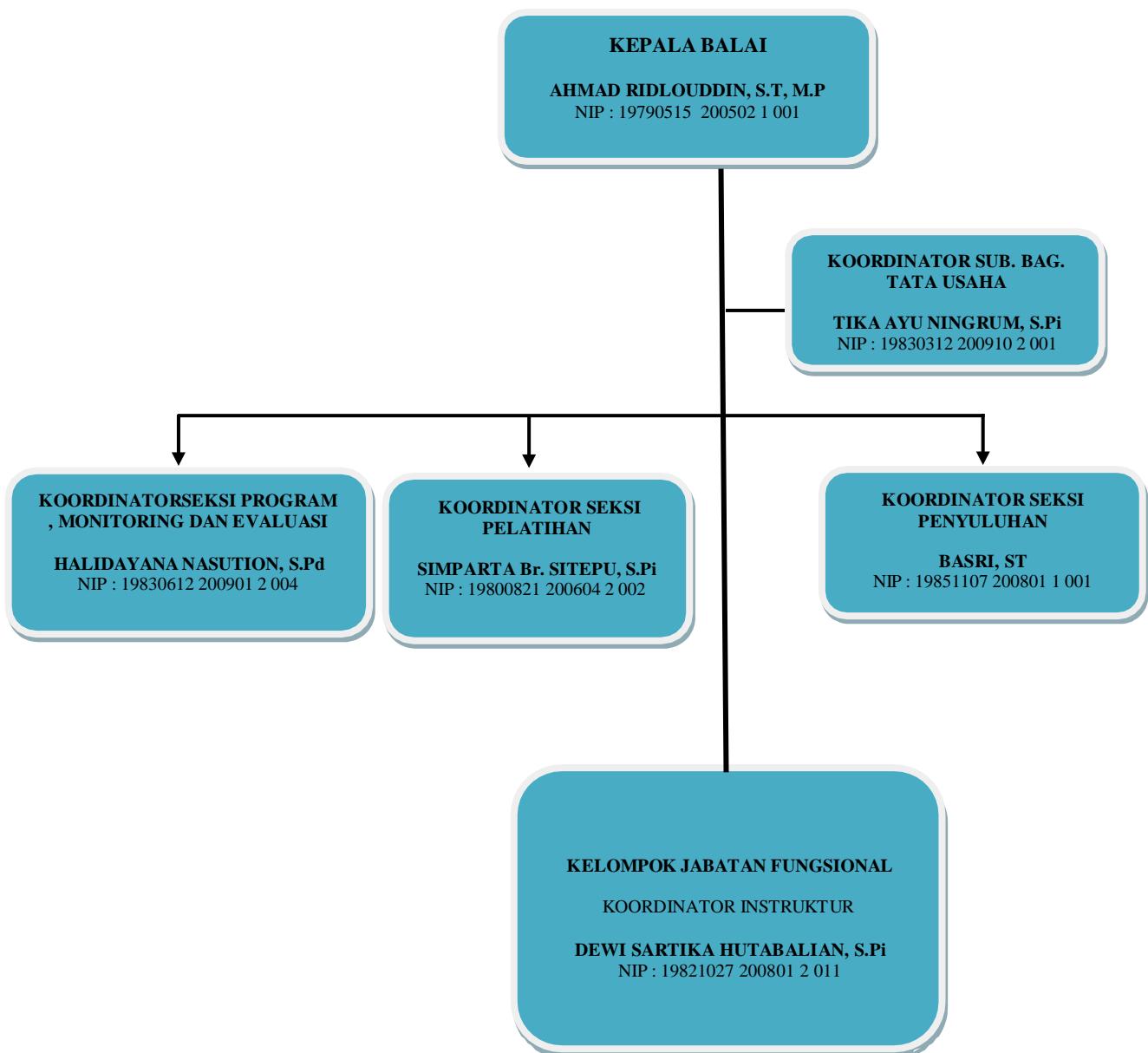
Widya swara BPPP Medan sampai dengan bulan Maret 2024 sudah tidak ada lagi karena sudah pensiun.

B. Instruktur BPPP Medan

Instruktur BPPP Medan pada tahun 2025 berjumlah
13 (tiga belas) orang terdiri dari 9 (sembilan) orang Instruktur
Muda, 3 (tiga) orang Instruktur Pertama, dan 1 (satu) orang
Instruktur Pelaksana Lanjutan.

STRUKTUR ORGANISASI

**BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN MEDAN BERDASARKAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR : 87/PERMEN-KP/2020, TANGGAL 28 DESEMBER 2020**



Dalam upaya pencapaian target pembangunan yang telah diprogramkan oleh Kementerian Kelautan dan perikanan tersebut, BPPP Medan sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Pusat Riset, Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan,membuat program kerja dan arah kebijakan yang dituangkan dalam visi, misi, serta sasaran strategis yang mendukung pada arah kebijakan Pusat Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yaitu:

VISI :

Visi BPPSDM mengacu pada Visi KKP adalah Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk **“Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan, Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”**.

MISI :

Misi BPPSDM mengacu pada 3 pilar yang menjadi misi KKP yakni :

1. Peningkatan Kualitas Manusia melalui Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional.
3. Mencapai Lingkungan Hidup yang berkelanjutan, melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Ketiga misi di atas dilakukan secara bertanggung jawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan bersama.

Dalam rangka penunjang keberhasilan menuju kesuksesan, maka Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan menyusun visi yang mewujudkan jati diri dan fungsinya sebagai UPT Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan sebagai berikut :

“Menjadikan Balai sebagai lembaga diklat yang mampu meningkatkan kualitas SDM dalam menunjang pembangunan Kelautan dan Perikanan yang berwawasan lingkungan”

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan mengemban tugas untuk melakukan langkah-langkah pelatihan bagi SDM Perikanan secara terpadu dengan mengemban misi untuk :

1. Penyusunan bahan kebijakan pelatihan dan penyuluhan
2. Penyusunan program dan anggaran, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelatihan dan penyuluhan
3. Pelatihan teknis dan manajerial dibidang perikanan
4. Penyusunan materi, metodologi dan pelaksanaan penyuluhan perikanan
5. Pemantauan kebutuhan pembentukan jaringan pengembangan tenaga teknis dan manajerial dibidang perikanan
6. Pengelolaan prasarana dan sarana pelatihan dan penyuluhan
7. Pengembangan dan fasilitasi kelembagaan dan forum masyarakat begai pelaku utama dan pelaku usaha
8. Penyusunan kebutuhan peningkatan kapasitas penyuluhan pegawai negeri sipil (PNS), swadaya, dan swasta
9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

B. TUJUAN DAN SASARAN

1. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran lebih lanjut dari Visi dan Misi KKP dalam rangka mencapai sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan 2015 – 2019. Dengan demikian tujuan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan dalam penyusunan laporan keuangan BPPP Medan adalah :

1. Sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPPP Medan menuju terwujudnya *good governance*, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat di satu sisi, dan di sisi lain;
2. Sebagai alat kendali dan alat pemicu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan BPPP Medan.
3. Sebagai umpan balik (Feedback) untuk perbaikan kinerja ditahun berikutnya.

2. SASARAN

Sasaran strategis program pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan 2015-2019 merupakan penjabaran Visi dan Misi pembangunan kelautan dan perikanan. Sasaran ditetapkan melalui tahapan-tahapan berdasarkan tujuan yang akan dicapai dan arah kebijakan yang tersusun kedalam 4 (empat) perspektif yakni :

1. *Stakeholder Perspective*
2. *Customer Perspective*
3. *Internal Process Perspective*
4. *Learn And Growth Perspective*

3. REVISI DIPA

Pada periode 30 Juni 2025 DIPA Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan telah diadakan direvisi sebanyak 5 kali :

1. *Revisi 1, Usulan Revisi Efisiensi Anggaran* sesuai Surat Usulan Revisi ke Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor B.432/BPPSDM/RC.420/II/2025, tanggal 14 Februari 2025.
2. *Revisi 2, Usulan Revisi Rekomposisi Blokir Efisiensi Anggaran BPPSDMKP Tahun 2025* sesuai Surat Usulan Revisi ke Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor : B.673/BPPSDM/RC.420/III/2025, tanggal 17 Maret 2025.
3. *Revisi 3, Usulan Revisi Relaksasi Blokir Efisiensi Anggaran BPPSDMKP Tahun 2025* sesuai Surat Usulan Revisi Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor B.747/BPPSDM/RC.420/III/2025, tanggal 25 Maret 2025.
4. *Revisi 4, Revisi Pemutakhiran Data POK* sesuai Surat Usulan Revisi ke Kanwil Nomor B.862/BRSDM.BPPP.MDN/RC.420/IV/2025, Tanggal 15 April 2025.
5. *Revisi 4, Revisi Pemutakhiran Halaman III DIPA* sesuai Surat Usulan Revisi ke Kanwil Nomor B.883/BRSDM.BPPP.MDN/RC.420/IV/2025, Tanggal 16 April 2025.

4. JUMLAH SDM

Jumlah SDM Aparatur Sipil Negara pada Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan adalah sebanyak 298 orang pegawai yang terdiri dari 45 orang pegawai negeri sipil Balai dan termasuk didalamnya Penyuluhan Perikanan sebanyak 154 orang dan 99 orang PPPK.

- | | |
|--------------------------|-------------|
| 1. Eselon I | : - |
| 2. Eselon III | : 1 orang |
| 3. Analis Kepegawaian | : 2 orang |
| 4. Pengelola PBJ | : 1 orang |
| 5. APK APBN | : 3 org |
| 6. Pranata Komputer | : 1 orang |
| 7. Perencana | : 1 orang |
| 8. Fungsional Umum | : 23 orang |
| 9. Widyaiswara | : - |
| 10. Instruktur | : 13 orang |
| 11. PPPK | : 99 orang |
| 12. Penyuluhan Perikanan | : 154 orang |

A.2.Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan yang merupakan entitas pelaporan dari Satuan Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-
LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban**(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset**(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar**a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perpendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperolehdengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut :
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari **Rp1.000.000 (Satu Juta Rupiah)**;
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari **Rp25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)**;
 - c) Pengeluaran yang tidak termasuk dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dihadwakan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perpendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah hutang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi

Pendapatan Negara
dan Hibah

Rp41.339.992,00

B.1 Pendapatan Negara

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 adalah senilai Rp41.339.992,00 atau mencapai 9,19 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan senilai Rp450.001.000,00 Pendapatan Negara dan Hibah Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan terdiri dari Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan Peternakan dan Budidaya (perolehan dari penjualan benih ikan) dan Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi (Sewa Asrama, Sewa AULA, Sewa Ruang Kelas, Sewa Workshop), Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (pph Pegawai) dan sudah mengacu pada PP Tarif PNBP Nomor 85 Tahun 2021.

Tabel 5
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	Rp 1.565.000	Rp 499.980,00	31,95
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	Rp 860.000	Rp -	0,00
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	Rp 14.200.000	Rp 40.840.000,00	287,61
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	Rp 433.376.000	Rp -	0,00
Jumlah	450.001.000	Rp 41.339.980,00	-

Berdasarkan Tabel 6 (Penjelasan perbandingan antara tahun berjalan dan tahun yang lalu). Penjelasan Realisasi Pendapatan berdasarkan pada Tabel.6.

*Tabel 6
Perbandingan Realisasi Pendapatan 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024*

URAIAN	30-Jun-25	30-Jun-24	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang	-	-	#DIV/0!
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	499.980,00	988.000,00	-49,39
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang	-	2.400.000,00	-100,00
Pendapatan dari Penggunaan Sarpras sesuai dengan Tusi	40.840.000,00	9.190.000,00	344,40
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	-	351.620.000,00	-100,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	1.395,00	-100,00
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	-	1.053.514,00	-100,00
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	-	2.989.735,00	-100,00
Pendapatan Denda Lainnya	-	6.096.000,00	-100,00
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	-	#DIV/0!
Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	-	#DIV/0!
Jumlah Pendapatan	41.339.980,00	374.338.644,00	11,04

Realisasi Belanja

Negara

Rp36.309.044.858,00.

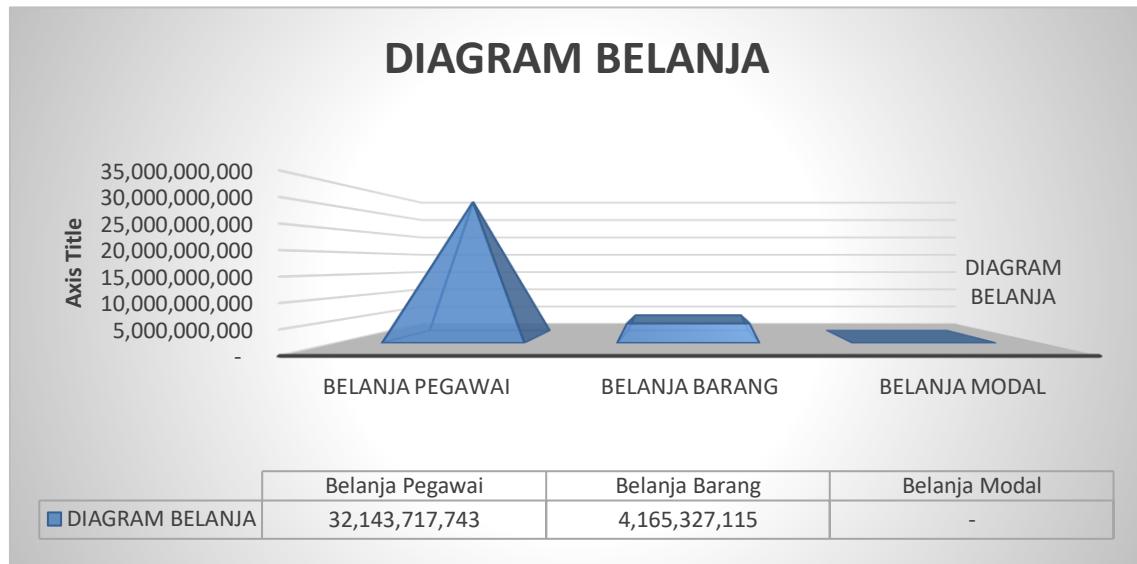
B.2. Belanja Negara

Realisasi belanja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan pada 30 Juni 2025 adalah senilai Rp36.309.044.858,00 atau 51,90 persen dari anggaran senilai Rp69.954.144.000,00. Rincian Anggaran dan realisasi belanja TA.2025 tersaji pada Tabel 7.

*Tabel 7
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025*

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
Belanja Pegawai	57.496.480.000,00	32.143.717.743,00
Belanja Barang	12.376.664.000,00	4.165.327.115,00
Belanja Modal	81.000.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA	69.954.144.000,00	36.309.044.858,00

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Berdasarkan Tabel 8 Perbandingan Realisasi Belanja (Bersih) 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 menunjukkan bahwa realisasi belanja pada TA.2025 mengalami penurunan senilai 55.73 persen dibandingkan realisasi belanja pada TA.2024. Hal ini disebabkan karena adanya blokir/efisiensi anggaran di tahun 2025.

*Tabel 8
Perbandingan Realisasi Belanja 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024*

URAIAN JENIS BELANJA	30-Jun-25	30-Jun-24	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	32.143.717.743,00	31.599.693.179,00	1,72
Belanja Barang	4.165.327.115,00	9.790.552.185,00	(57,46)
Belanja Modal	-	654.737.000,00	0
Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah Belanja	36.309.044.858,00	42.044.982.364,00	(55,73)

Belanja Pegawai

Rp32.143.717.743,00

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan pada TA.2025 meliputi : Belanja Gaji dan Tunjangan PNS; Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS; Belanja Honorarium; Belanja Lembur; Belanja Vakasi; dan Tunjangan Kinerja Pegawai.

Realisasi Belanja Pegawai 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing senilai Rp32.143.717.743,00 dan Rp31.599.693.179,00 Berdasarkan Tabel 9, realisasi

belanja per 30 Juni 2025 mengalami Kenaikan senilai 1.72 persen dari realisasi belanja per 30 Juni 2024. Hal ini disebabkan karena Pegawai dan Penyuluhan banyak yang kenaikan pangkat dan jabatan.

Tabel 9
Perbandingan Belanja Pegawai 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

URAIAN JENIS BELANJA	30-Jun-25	30-Jun-24	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	32.143.717.743,00	31.599.693.179,00	1,72
Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	0,00	0,00	-
Belanja Honorarium	0,00	0,00	-
Belanja Lembur	0,00	0,00	-
Belanja Vakasi	0,00	-	-
Jumlah Belanja Kotor	32.143.717.743,00	31.599.693.179,00	1,72
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-
Jumlah Belanja Bersih	32.143.717.743,00	31.599.693.179,00	1,72

Belanja Barang

Rp4.165.327.115,00

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing senilai Rp4.165.327.115,00 dan Rp9.790.552.185,00 .

Berdasarkan Tabel 10, Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2025 mengalami penurunan senilai Rp5.625.225.070,00 atau 135.05 persen dari Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2024 Hal ini disebabkan adanya efisiensi anggaran.

Tabel 10
Perbandingan Belanja Barang 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

Uraian	30-Jun-25	30-Jun-24	Naik/(Turun)	%
Beban Keperluan Perkantoran	Rp 135.554.890,00	Rp 112.488.716,00	Rp (23.066.174)	-17
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	Rp 1.580.658,00	Rp 2.673.000,00	Rp 1.092.342	0
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	Rp 51.960.000,00	Rp 46.460.000,00	Rp (5.500.000)	-11
Beban Barang Operasional Lainnya	Rp 63.054.075,00	Rp 73.799.021,00	Rp 10.744.946	17
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	Rp 10.407.400,00	Rp 54.758.574,00	Rp 44.351.174	426
Beban Bahan	Rp -	Rp 1.573.551.718,00	Rp 1.573.551.718	#DIV/0!
Beban Honor Output Kegiatan	Rp 3.175.400.000,00	Rp 3.414.500.000,00	Rp 239.100.000	8
Beban Barang Non Operasional Lainnya	Rp 38.359.841,00	Rp 1.112.887.230,00	Rp 1.074.527.389	2.801
Beban Langganan Listrik	Rp 142.941.400,00	Rp 142.780.742,00	Rp (160.658)	0
Beban Langganan Telepon	Rp 1.730.997,00	Rp 3.799.083,00	Rp 2.068.086	119
Beban Langganan Air	Rp 47.594.520,00	Rp 74.367.474,00	Rp 26.772.954	56
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	Rp 27.248.159,00	Rp 59.542.691,00	Rp 32.294.532	0
Beban Sewa	Rp -	Rp 221.000.000,00	Rp 221.000.000	
Beban Jasa Profesi	Rp -	Rp 163.700.000,00	Rp 163.700.000	#DIV/0!
Beban Jasa Lainnya	Rp 340.493.752,00	Rp 332.530.745,00	Rp (7.963.007)	-2
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp -	Rp 260.413.000,00	Rp 260.413.000	#DIV/0!
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp 68.521.167,00	Rp 93.786.226,00	Rp 25.265.059	37
Beban Pemeliharaan Jaringan	Rp 5.675.000,00	Rp 25.497.570,00	Rp 19.822.570	0
Beban Perjalanan Dinas Biasa	Rp 54.805.256,00	Rp 813.966.395,00	Rp 759.161.139	1.385
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp -	Rp 1.208.050.000,00	Rp 1.208.050.000	#DIV/0!
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Rp -	Rp -	Rp -	#DIV/0!
Jumlah Belanja Neto	Rp 4.165.327.115,00	Rp 9.790.552.185,00	Rp 5.625.225.070	135,05

Belanja Modal Tanah

Rp0,00

B.6 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

Berdasarkan Tabel 11, Realisasi Belanja Modal Tanah TA.2025 sudah terealisasi senilai Rp0,00 berupa :

*Tabel 11
Perbandingan Belanja Modal Tanah per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024*

URAIAN JENIS BELANJA	30-Jun-25	30-Jun-24	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Sertifikat Tanah	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0,00	0,00	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Bersih	0,00	0,00	0,00

Belanja Modal

Peralatan dan Mesin

Rp0,00

B.7 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00 .

Berdasarkan Tabel 11, Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA.2025 sudah terealisasi senilai Rp0,00 berupa :

*Tabel 12
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024*

URAIAN JENIS BELANJA	30-Jun-25	30-Jun-24	Naik (Turun) %
Pengadaan Mobil Dinas Innova Zenix	0,00	0,00	#DIV/0!
Jumlah Belanja Bersih	0,00	0,00	#DIV/0!

Belanja Modal

Gedung dan

Bangunan Rp0,00

B.8. Belanja Modal Gedung Dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

Berdasarkan Tabel 13, Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA.2025 sudah terealisasi senilai Rp0,00 berupa :

Tabel 13
*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024*

URAIAN JENIS BELANJA	30-Jun-25	04-Jan-00	Naik (Turun) %
Renovasi Gedung PTSP	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0,00	0,00	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Bersih	0,00	0,00	0,00

*Belanja Modal Jalan,
Irigasi dan Jaringan
Rp0,00.*

B.9 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

Berdasarkan Tabel 11, Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA.2025 sudah terealisasi senilai Rp0,00 berupa :

Tabel 14
*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024*

URAIAN JENIS BELANJA	30-Jun-25	30-Jun-24	Naik (Turun) %
Belanja Modal Irigasi	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jaringan	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0,00	0,00	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Bersih	0,00	0,00	0,00

*Belanja Modal
Lainnya Rp0,0*

B.10 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

*Belanja Bantuan
Sosial Rp0,00*

B.11. Belanja Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan tidak memiliki Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA. 2025.

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

Kas di Bendahara

Pengeluaran

Rp42.000.000,00.

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing senilai Rp42.000.000,00 dan Rp0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam Tabel 15.

Tabel 15
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

No	Jenis	30-Jun-25	31-Des-24
1	Saldo UP	42.000.000,00	-
2	Kuitansi UP	-	-
Jumlah		42.000.000,00	-

Kas di Bendahara

Penerima Rp0,00

C.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan selaku wajib pungut yang belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

Kas Lainnya dan Setara

Kas Rp0,00

C.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00 yang merupakan kas berada dibawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai.

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas disajikan dalam Tabel 16.

*Tabel 16
Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas*

No	Jenis	30-Jun-25	30-Jun-24
1	Kas Lainnya dan Setara Kas	-	0
	Jumlah	-	-

Piutang Bukan Pajak

Rp0,00

Saldo Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah senilai Rp0,00 (Netto) dan Rp0,00.

Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan dalam Tabel 17.

*Tabel 17
Rincian Piutang Bukan Pajak*

No	Uraian	30-Jun-25	31-Des-24
	NIHIL		
	Jumlah	-	-

Mutasi piutang PNBP pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Saldo per 30 Juni 2025	-
Mutasi tambah:	
Penjualan Informasi, Penerbitan, Film, Survey, Pemetaan dan Hasil Cetakan Lainnya	-
Mutasi kurang:	
Pelunasan tahun 2025	-
Saldo per 30 Juni 2025	-

Bag Lancar TGR Rp0,00

C.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.

Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR tersaji dalam Tabel 18 adalah nihil

*Tabel 18
Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)*

No	Uraian	30-Jun-25	31-Des-24
1	-	-	-
	Jumlah	-	-

Sedangkan mutasi Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut:

Saldo per 30 Juni 2025	0
Mutasi tambah:	
Bag Lancar Tagihan TP/TGR 2024	0
Mutasi kurang:	
Pelunasan tahun 2025	0
Saldo per 30 Juni 2025	0

Bagian Lancar Tagihan
Penjualan Angsuran
Rp0,00

C.6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

Penyisihan Piutang Tak
Tertagih – Bag. Lancar
TP/TGR Rp0,00

C.7. Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Jangka Pendek

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah senilai Rp0, senilai Rp0,00.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Jangka Pendek pada tanggal Pelaporan adalah sebagai berikut :

*Tabel 19
Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Jangka Pendek*

Debitur	Kualitas	Nilai Piutang	%	Nilai Penyusutan
	Lancar	-	0,00%	-
	Lancar	-	0,00%	-
Jumlah				-

Belanja dibayar dimuka
Rp0,00

C.8. Belanja di Bayar Di Muka

Saldo Belanja dibayar dimuka per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Belanja dibayar dimuka merupakan hak yang harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal Neraca sebagai akibat dari barang/Jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa diterima seluruhnya. Rincian belanja dibayar dimuka adalah sebagai berikut :

*Tabel 20
Rincian Belanja dibayar dimuka*

No	Jenis	30-Jun-25	31-Des-24
1	NIHIL	-	-
2		-	-
Jumlah		-	-

Persediaan
Rp2.523.900,00.

C.9 Persediaan

Nilai Persediaan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah senilai Rp2.523.900,00 dan Rp1.671.160,00.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional perkantoran.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 tersaji pada Tabel 21.

*Tabel 21
Rincian Persediaan*

No	Persediaan	30-Jun-25	31-Des-24
1	Barang Konsumsi	2.503.900	1.235.000
2	Bahan untuk Pemeliharaan	-	-
3	Suku Cadang	-	-
4	Bahan Baku	-	-
5	Persediaan Lainnya	20.000	436.160
Jumlah		2.523.900	1.671.160

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik berupa Barang Konsumsi, Barang untuk Pemeliharaan, Bahan Baku (Solar) dan Persediaan Lainnya (obat-obatan).

Bagian Lancar TGR

Rp0,00

C.10.Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.

Rincian Tagihan TP/TGR tersaji dalam Tabel 21 adalah Nihil.

Tabel 22
Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

No	Uraian	30-Jun-25	31-Des-24
1		-	-
2		0	0
Jumlah		-	-

Sedangkan mutasi Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut:

Saldo per 30 Juni 2025	0
Mutasi tambah:	
Bag Lancar Tagihan TP/TGR 2025	0
Mutasi kurang:	
Pelunasan tahun 2025	0
Saldo per 30 Juni 2025	0

Mutasi penambahan dan pengurangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Mutasi tambah senilai Rp0,00 merupakan reklasifikasi dari Tagihan TP/TGR jangka panjang sebagai Bagian Lancar di 30 Juni 2025
- Mutasi kurang senilai Rp0,00.

Tagihan Penjualan

Angsuran Rp0,00

C.11.Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah senilai Rp0,00. dan Rp0,00.

Tanah

Rp23.070.382.448,00.

C.12. Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah senilai Rp23.070.382.448,00 dan Rp23.070.382.448,00.

Rincian saldo tanah per TA.2025 disajikan pada Tabel 23.

*Tabel 23
Rincian Saldo Tanah*

No	KIB	Luas	Nilai
1	'001	1.800	1.527.836.448,00
2	'001	22.219	17.815.750.000,00
3	'002	3.925	2.905.776.000,00
4	'003	1.109	821.020.000,00
Jumlah		29.053	23.070.382.448,00

Peralatan dan Mesin

Rp20.274.862.885,00.

C.13. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah senilai Rp20.274.862.885,00 dan Rp20.274.862.885,00.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut

Saldo per 31 Desember 2024	Rp 20.274.862.885,00
Mutasi tambah:	
Pembelian	Rp -
Hibah	Rp -
Transfer Masuk	
Perolehan Lainnya	Rp -
Mutasi kurang:	Rp -
Penghentian aset dari penggunaan	Rp -
Penghapusan	Rp -
Saldo per 30 Juni 2025	Rp 20.274.862.885,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025	Rp (19.557.521.633,00)
Nilai Buku per 30 Juni 2025	Rp 717.341.252,00

Tidak ada penambahan Aset Peralatan dan Mesin untuk Semester I Tahun 2025.

Gedung dan Bangunan
Rp22.696.410.007,00.

C.14. Gedung dan Bangunan

Nilai gedung dan bangunan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah senilai Rp22.696.410.007,00 dan Rp22.696.410.007,00 ada mutasi bertambah dan berkurang pada Semester I Tahun 2025.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2024	22.696.410.007,00
Mutasi tambah:	
Pengembangan Nilai Aset	-
Transfer Masuk	
Koreksi pencatatan nilai penambahan daya listrik	-
Mutasi kurang:	
Reklas	
Koreksi Pencatatan	
Saldo per 30 Juni 2025	22.696.410.007,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025	(4.628.672.689,00)
Nilai Buku per 30 Juni 2025	18.067.737.318,00

Tidak ada mutasi bertambah untuk Gedung dan Bangunan pada Semester I TA. 2025.

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp5.480.462.700,00.

C.15 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp5.480.462.700,00 dan Rp5.526.972.700,00 tidak ada penambahan nilai aset pada jalan, irigasi dan jaringan di Tahun 2025.

Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2024	5.480.462.700,00
Mutasi tambah:	
Pengembangan Informasi Teknologi	-
Mutasi kurang:	
Koreksi nilai	-
Saldo per 30 Juni 2025	5.480.462.700,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025	(3.960.453.355,00)
Nilai Buku per 30 Juni 2025	1.520.009.345,00

Tidak Ada transaksi penambahan pada Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Tahun 2025 di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan.

Aset Tetap Lainnya
Rp62.748.900,00.

C.16 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp62.748.900,00 dan Rp62.748.900,00 tidak ada penambahan pada Tahun 2025 pada Aset Tetap Lainnya.

Saldo per 31 Desember 2024	Rp	62.748.900,00
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	-
Hibah	Rp	-
Reklasifikasi	Rp	-
Mutasi kurang:		
Penghentian aset dari penggunaan	Rp	-
Penghapusan	Rp	-
Saldo per 30 Juni 2025	Rp	62.748.900,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025	Rp	-
Nilai Buku per 30 Juni 2025	Rp	62.748.900,00

Aset Tetap Lainnya yaitu berupa monografi (Buku Perpustakaan) sebanyak 258 buah senilai Rp32.620.400,00 CD/VCD/DVD sebanyak 12 buah senilai Rp29.628.500,00 dan Peta sebanyak 1 buah senilai Rp500.000,00.

Konstruksi dalam
Pengerjaan Rp0,00.

C.17 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp(28.146.647.677,00)

C.18. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp(28.146.647.677,00) dan Rp(27.565.774.274,00)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasiannya atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per TA.2025 disajikan pada Tabel 24, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

*Tabel 24
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap*

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	Rp 20.274.862.885,00	Rp 19.557.521.633,00	Rp 717.341.252,00
2	Gedung dan Bangunan	Rp 22.696.410.007,00	Rp 4.628.672.689,00	Rp 18.067.737.318,00
3	Jalan dan Jembatan	Rp 3.484.405.050,00	Rp 3.171.207.745,00	Rp 313.197.305,00
4	Irigasi	Rp 1.115.877.000,00	Rp 501.886.410,00	Rp 613.990.590,00
5	Jaringan	Rp 880.180.650,00	Rp 287.359.200,00	Rp 592.821.450,00
6	Aset Tetap Lainnya	Rp 62.748.900,00	Rp -	Rp 62.748.900,00
7	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintah	Rp -	Rp -	Rp -
Akumulasi Penyusutan		Rp 48.514.484.492,00	Rp 28.146.647.677,00	Rp 20.367.836.815,00

Aset Tak Berwujud Rp0,00

C.19. Aset Tak Berwujud

Nilai Saldo aset tak berwujud (ATB) per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp0,00 dan Rp0,00.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Rincian Aset Tak Berwujud per 30 Juni TA.2025 disajikan pada Tabel 25.

*Tabel 25
Rincian Aset tak Berwujud*

No.	Uraian	Nilai
	NIHIL	
Jumlah		Rp -

Aset Lain-lain Rp0,00.

C.20. Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah senilai Rp0,00 dan Rp346.955.000,00. Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan sudah dilakukan penghapusan oleh KPKNL dari BMN.

Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	Rp 346.955.000,00
Mutasi tambah:	
- reklassifikasi dari aset tetap	Rp -
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	Rp -
- penghapusan BMN	Rp -
Saldo per 30 Juni 2025	Rp -
Akumulasi Penyusutan	Rp -
Nilai Buku per 30 Juni 2025	Rp -

Tidak ada transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lain pada Semester I Tahun 2025.

*Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
Rp0,00*

C.21. Akumulasi Penyusutan dan Amortasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Lainnya per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp0,00 dan Rp(346.955.000,00).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per TA.2025 sebagai berikut :

Tabel. Akumulasi Penyusutan dan Amortasi Aset Lainnya.

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Aset Tak Berwujud	Rp -	Rp -	Rp -
2	Aset Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -
	Akumulasi Penyusutan	Rp -	Rp -	Rp -

C.3 Piutang Jangka Panjang

*Tuntutan Perpendidaraan
Rp0,00.*

Nilai Tagihan Tuntutan Perpendidaraan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

Tuntutan Perpendidaraan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaianya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaianya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perpendidaraan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 30 Juni 2025 disajikan pada Tabel 26.

*Tabel 26
Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)*

No.	Debitur	Jumlah
		NIHIL
	Jumlah	Rp0,00

Sedangkan mutasi (TP/TGR) pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024		Rp0,00
Mutasi tambah:		Rp0,00
- TGR		Rp0,00
Mutasi kurang:		
- Reklasifikasi menjadi Bagian Lancar TP/TGR		Rp0,00
Saldo per 30 Juni 2025		Rp0,00

Penyisihan Piutang tak
Tertagih - Tuntutan
Perbendaharaan Rp0,00

C.3.2. Penyisihan Piutang tak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan estimasi atas ketidak tertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TP/TGR.

Perhitungan Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) untuk masing-masing debitur disajikan pada Tabel 27.

*Tabel 27
Rincian Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti
Rugi (TP/TGR)*

Debitur	Kualitas	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
	Lancar	-	0,00%	-
	Lancar	-	0,00%	-
Total				-

Aset Lainnya Rp0,00

C.4 Aset Lainnya

Nilai Aset Lainnya pada tanggal pelaporan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp0,00 dan Rp0,00. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan, baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap. Rincian Aset Lainnya disajikan pada Tabel 28.

Tabel 28
Rincian Aset Lainnya

No.	Uraian	30-Jun-25	31-Des-24
1	Aset Tak Berwujud	Rp -	Rp -
2	Aset Lain-Lain	Rp -	Rp -
Jumlah		Rp -	Rp -
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		Rp -	Rp -
Nilai Buku per 30 Juni 2025		Rp -	Rp -

Aset Tak Berwujud Rp0,00

C.4.1. Aset Tak Berwujud

Nilai Saldo aset tak berwujud (ATB) per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp0,00 dan Rp0,00.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Rincian Aset Tak Berwujud per TA.2025 disajikan pada Tabel 29.

Tabel 29
Rincian Aset tak Berwujud

No.	Uraian	Nilai
1	NIHIL	
2		
3		
Jumlah		Rp -

Uang Muka dari KPPN
Rp42.000.000,00.

C.5.2 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp42.000.000,00 dan Rp0,00.

Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di

Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

Utang Kepada Pihak

Ketiga Rp1.930.996.343,00

C.5.1 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp1.930.996.343,00 dan Rp40.841.074,00.

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan per tanggal pelaporan disajikan pada Tabel 30.

Tabel 30
Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

No	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1	Belanja Pegawai yang sudah dibayar	Rp 1.930.996.343	Gaji PNS dan Penyuluhan Bulan Juli 2025
2	Belanja barang yang masih harus dibayar	Rp -	-
3	Utang kepada Pihak ketiga lainnya	Rp -	-
Total		Rp 1.930.996.343	-

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga pada TA.2025 senilai Rp1.930.996.343,00.

Utang yang belum ditagihkan Rp0,00.

C.5.2 Utang yang belum ditagihkan

Utang yang belum ditagihkan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

Utang yang belum ditagihkan merupakan belanja perjalanan dinas yang menggunakan Kartu Kredit Pemerintah yang belum dibayarkan.

Tabel 31 .
Rincian Utang yang belum ditagihkan

No	Uraian	2024
1	-	Rp -
Total		Rp -

Ekuitas

Rp41.509.746.820,00.

C.26. EKUITAS

Ekuitas per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp41.509.746.820,00 dan Rp43.979.922.752,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang Ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS- POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNBP

Rp41.339.992,00.

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah senilai Rp41.339.992,00 dan Rp349.344.000,00 Pendapatan tersebut terdiri dari :

*Tabel 32
Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024*

No.	30-Jun-25	30-Jun-24	Naik (Turun) %
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	Rp 499.980,00	Rp 988.000,00	(49)
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	Rp -	Rp 2.400.000,00	(100)
Pendapatan Penggunaan Sarpras sesuai Tusi	Rp 40.840.000,00	Rp 2.640.000,00	1.447
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	Rp -	Rp 337.220.000,00	(100)
Pendapatan Denda Lainnya	Rp -	Rp 6.096.000,00	(100)
Pendapatan Penjualan Hasil Non Litbang Lainnya	Rp -	Rp -	#DIV/0!
Penerimaan kembali Belanja Pegawai TAYL	Rp 12,00	Rp -	#DIV/0!
Jumlah	Rp 41.339.992,00	Rp 349.344.000,00	Rp (88)

Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) senilai Rp41.339.992,00 merupakan pendapatan dari Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya (merupakan pendapatan hasil sampling dari budidaya ikan nila), Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi (merupakan pendapatan dari sewa asrama, AULA, Kelas dan Workshop) dan Penerimaan kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu (merupakan pendapatan dari potongan SPM nomor 00036A berupa pembulatan gaji kenaikan berkala).

Beban Pegawai

Rp34.074.714.086,00.

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing senilai Rp34.074.714.086,00 dan Rp33.522.534.698,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Tabel 33
Rincian Beban Pegawai per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024*

No.	30-Jun-25	30-Jun-24	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	Rp 10.008.206.200,00	Rp 10.278.655.200,00	(2,63)
Beban Pembulatan Gaji PNS	Rp 136.965,00	Rp 151.887,00	(9,82)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	Rp 777.819.900,00	Rp 777.055.670,00	0,10
Beban Tunj. Anak PNS	Rp 263.219.222,00	Rp 272.447.428,00	(3,39)
Beban Tunj. Struktural PNS	Rp 11.340.000,00	Rp 11.340.000,00	-
Beban Tunj. Fungsional PNS	Rp 1.870.422.000,00	Rp 1.922.052.000,00	(2,69)
Beban Tunj. PPh PNS	Rp 170.662.672,00	Rp 185.469.838,00	(7,98)
Beban Tunj. Beras PNS	Rp 558.068.520,00	Rp 580.663.560,00	(3,89)
Beban Uang Makan PNS	Rp 910.532.000,00	Rp 957.332.000,00	(4,89)
Beban Tunj. Umum PNS	Rp 42.725.000,00	Rp 49.100.000,00	(12,98)
Beban Gaji Pokok PPPK	Rp 2.961.833.800,00	Rp 2.670.018.800,00	10,93
Beban Pembulatan Gaji PPPK	Rp 49.914,00	Rp 53.784,00	(7,20)
Beban Tunj. Suami/Istri PPPK	Rp 177.238.960,00	Rp 161.129.600,00	10,00
Beban Tunj. Anak PPPK	Rp 48.214.712,00	Rp 40.118.708,00	20,18
Beban Tunj. Fungsional PPPK	Rp 480.780.000,00	Rp 430.080.000,00	11,79
Beban Tunj. Beras PPPK	Rp 159.324.000,00	Rp 140.494.800,00	13,40
Beban Uang Makan PPPK	Rp 334.859.000,00	Rp 287.146.000,00	16,62
Beban Pegawai (Tunj. Khusus/Kegiatan/Kinerja)	Rp 12.083.532.014,00	Rp 12.064.415.733,00	0,16
Beban Pegawai (Tunj. Khusus/Kegiatan/Kinerja) PPPK	Rp 3.215.749.207,00	Rp 2.694.809.690,00	19,33
Jumlah	Rp 34.074.714.086,00	Rp 33.522.534.698,00	1,65

D.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan

Rp9.554.660,00.

Jumlah Beban Persediaan per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing senilai Rp9.554.660,,00 dan Rp52.043.994,00 . Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut :

*Tabel 34
Beban Persediaan per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024*

URAIAN JENIS BEBAN	30-Jun-25	30-Jun-24	Naik (Turun) %
Beban Persediaan Konsumsi	Rp 9.138.500,00	Rp 44.964.000,00	(80)
Beban Persediaan Lainnya	Rp 416.160,00	Rp 7.079.994,00	(94)
Jumlah	Rp 9.554.660,00	Rp 52.043.994,00	(82)

Beban Barang dan
Jasa
Rp3.985.077.218,00.

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Jasa per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing senilai Rp3.985.077.218,00 dan Rp7.288.138.125,00 . Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 sebagai berikut :

*Tabel 35.
Rincian Beban Jasa per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024*

URAIAN JENIS BEBAN	30-Jun-25	30-Jun-24	Naik (Turun) %
Beban Keperluan Perkantoran	Rp 135.554.890,00	Rp 112.488.716,00	20,51
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	Rp 1.580.658,00	Rp 2.673.000,00	(40,87)
Beban Honor Op. Satuan Kerja	Rp 51.960.000,00	Rp 46.460.000,00	11,84
Beban Barang Op. Lainnya	Rp 63.054.075,00	Rp 73.799.021,00	(14,56)
Beban Bahan	Rp -	Rp 1.573.551.718,00	-
Beban Honor Output Kegiatan	Rp 3.175.400.000,00	Rp 3.414.500.000,00	101,80
Beban Barang Non Op. Lainnya	Rp 38.359.841,00	Rp 1.112.887.230,00	(98,88)
Beban Langganan Listrik	Rp 115.898.478,00	Rp 118.388.383,00	(2,10)
Beban Langganan Telepon	Rp 1.096.845,00	Rp 3.188.631,00	(65,60)
Beban Langganan Air	Rp 40.030.520,00	Rp 58.427.990,00	(31,49)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	Rp 21.648.159,00	Rp 59.542.691,00	(63,64)
Beban Sewa	Rp -	Rp 221.000.000,00	(100,00)
Beban Jasa Profesi	Rp -	Rp 163.700.000,00	(100,00)
Beban Jasa Lainnya	Rp 340.493.752,00	Rp 327.530.745,00	3,96
Jumlah	Rp 3.985.077.218,00	Rp 7.288.138.125,00	(45,32)

Beban Pemeliharaan
Rp74.196.167,00.

Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing senilai Rp74.196.167,00 dan Rp412.696.796,00. Beban Pemeliharaan merupakan Beban yang maksudkan untuk mempertahankan Aset Tetap atau Aset Lainnya yang sudah ke kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut :

*Tabel 36
Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024*

URAIAN JENIS BEBAN	30-Jun-25	30-Jun-24	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Ged dan Bangunan	Rp -	Rp 293.413.000,00	(100,00)
Beban Pemeliharaan Perl dan Mesin	Rp 68.521.167,00	Rp 93.786.226,00	(26,94)
Beban Pemeliharaan Jaringan	Rp 5.675.000,00	Rp 25.497.570,00	(77,74)
Jumlah	Rp 74.196.167,00	Rp 412.696.796,00	(82,02)

D.6 Beban Perjanan Dinas

Beban Perjalanan
Dinas
Rp54.805.256,00.

Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing senilai Rp54.805.256,00 dan Rp2.036.284.816,00. Beban tersebut adalah merupakan Beban yang terjadi untuk perjalanan Dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 37
Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

URAIAN JENIS BEBAN	30-Jun-25	30-Jun-24	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	Rp 54.805.256,00	Rp 828.234.816,00	(93,38)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp -	Rp 1.208.050.000,00	
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Rp -	Rp 76.050.000,00	(100,00)
Jumlah	Rp 54.805.256,00	Rp 2.112.334.816,00	(97,41)

Beban Barang Untuk
disediakan kepada
Masyarakat Rp0,00

D.7 Beban Barang Untuk diserahkan kepada Masyarakat

Beban barang untuk diserahkan kepada Masyarakat per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Beban Barang Untuk diserahkan kepada Masyarakat merupakan Beban Pemerintah dalam bentuk Barang dan Jasa kepada Masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan Instansi dalam hal meningkatkan pemahaman Masyarakat mengenai Akuntasi Berbasis Akrual.

Tabel 38
Rincian Beban Barang Untuk diserahkan kepada Masyarakat

URAIAN JENIS BEBAN	30-Jun-25	30-Jun-24	Naik (Turun) %
Beban Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada Masyarakat	Rp -	Rp -	
Beban Peralatan dan Mesin Untuk diserahkan kepada Masyarakat	Rp -	Rp -	
Beban Barang lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	Rp -	Rp -	
Jumlah	Rp -	Rp -	

Beban Bantuan Sosial
Rp0,00

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Beban Bantuan Sosial merupakan beban perintah dalam bentuk uang/ barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya resiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial adalah sebagai berikut :

*Tabel 39
Rincian Beban Bantuan Sosial*

URAIAN JENIS BEBAN	30-Jun-25	30-Jun-24	Naik (Turun) %
Beban Langganan Daya dan Jas	Rp -	Rp -	
Beban Jasa Pos dan Giro	Rp -	Rp -	
Beban Jasa Konsultan	Rp -	Rp -	
Beban Jasa Lainnya	Rp -	Rp -	
Jumlah	Rp -	Rp -	

*Beban Penyusutan
dan Amortisasi*

Rp580.873.403,00.

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing senilai Rp580.873.403,00 dan Rp623.063.640,00. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat Alokasi sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (depreciable asset) selama masa aset yang bersangkutan. Sedangkan beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat Ekonomi untuk aset tak berwujud. Rincian beban Penyusutan dan amortisasi per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut :

*Tabel 40
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024*

URAIAN JENIS BEBAN	30-Jun-25	30-Jun-24	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp 109.724.584,00	Rp 151.884.925,00	(27,76)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp 291.795.191,00	Rp 291.825.087,00	(0,01)
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	Rp 156.598.652,00	Rp 156.598.652,00	-
Beban Penyusutan Irigasi	Rp 11.131.026,00	Rp 11.131.026,00	-
Beban Penyusutan Jaringan	Rp 11.623.950,00	Rp 11.623.950,00	-
Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah	Rp -	Rp -	#DIV/0!
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp 580.873.403,00	Rp 623.063.640,00	(6,77)

*Beban Penyisihan
Piutang Tak Tertagih
Rp0,00.*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidak tertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah beban penyisihan piutang tak tertagih per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Rincian beban penyisihan piutang tak tertagih per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut :

*Tabel 41
Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih*

URAIAN JENIS BEBAN	30-Jun-25	30-Jun-24	Naik (Turun) %
Beban Penyisihan Piutang tak tertagih-	Rp -	Rp -	
Beban Penyisihan Piutang tak tertagih-	Rp -	Rp -	
Jumlah	Rp -	Rp -	

Beban Lain-Lain
Rp0,00

D.11 Beban Lain-Lain

Jumlah beban lain-lain per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Beban lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas belanja lain-lain per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut :

*Tabel 42
Rincian Beban Lain-Lain*

URAIAN JENIS BEBAN	30-Jun-25	30-Jun-24	Naik (Turun) %
Beban Aset ekstrakomtabel perl dan m	Rp -	Rp -	
Beban aset ekstrakomtabel ged dan ba	Rp -	Rp -	
Beban aset tetap lainnya	Rp -	Rp -	
Jumlah	Rp -	Rp -	

Surplus/ Defisit dari kegiatan non operasional lainnya
Rp12,00.

D.12 Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pos Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional lainnya terdiri dari beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut :

*Tabel 43
Rincian Kegiatan Non Operasional per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024*

URAIAN JENIS BEBAN	30-Jun-25	30-Jun-24	Naik (Turun) %
Pendapatan dari pemindahtanganan BMN Lainnya			#DIV/0!
Jlh Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	Rp -	Rp -	#DIV/0!
Penerimaan Belanja Pegawai TAYL	Rp 12,00	Rp 1.395,00	(99)
Penerimaan Belanja Barang TAYL	Rp -	Rp 1.053.514,00	(100)
Penerimaan Belanja Modal TAYL	Rp -	Rp 2.989.735,00	(100)
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	Rp -	Rp 199.340.000,00	(100)
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	Rp -	Rp -	#DIV/0!
Jlh Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional	Rp 12,00	Rp 203.384.644,00	(100)
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	Rp -	Rp -	#DIV/0!
Jlh Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp 12,00	Rp 203.384.644,00	(100)
Surplus (Defisit) dari kegiatan non operasional	Rp 12,00	Rp 203.384.644,00	(100)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	-38737880798		#DIV/0!
Beban Luar Biasa	Rp -		#DIV/0!
POS LUAR BIASA	Rp -		#DIV/0!
SURPLUS/DEFISIT LO	-38737880798		#DIV/0!

Pos luar biasa Rp0,00

D.13 Pos Luar Biasa

Pos luar biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi,tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian pos luar biasa per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut :

*Tabel 44
Rincian Pos Luar Biasa*

URAIAN JENIS BEBAN	30-Jun-25	30-Jun-24	Naik (Turun) %
Pendapatan PNBP	Rp -	Rp -	
Beban perjalanan Dinas	Rp -	Rp -	
Beban Persediaan	Rp -	Rp -	
Jumlah			

E. PENJELASAN ATAS POS- POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp43.979.922.752,00.

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing senilai Rp43.979.922.752,00 dan Rp44.367.937.329,00.

Defisit LO

Rp(38.737.880.798,00)

E.2. Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah senilai Rp(38.737.880.798,00) dan Rp(43.378.985.425,00). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional. Surplus/defisit kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

Penyesuaian Nilai Aset

Rp0,00.

E.3. Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset mencerminkan koreksi atas penyesuaian nilai tahun berjalan. Rincian Penyesuaian Nilai Aset tahun 2025 :

Jenis Aset	Nilai Aset
Penyesuaian Nilai Aset	Rp -
	Rp -
Jumlah	Rp -

Selisih Revaluasi Aset

Rp0,00

E.4. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Koreksi atas nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai koreksi nilai Aset Tetap tersebut adalah koreksi nilai Gedung dan Bangunan.

Koreksi Atas Reklasifikasi Rp0,00.

E.5. Koreksi Aset Reklasifikasi

Koreksi atas Reklasifikasi per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

E.6. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset
Tetap/Lainnya Non
Revaluasi Rp0,00

Koreksi Atas Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

E.6. Lain-lain

Lain-lain Rp0,00

Koreksi Atas Pendapatan merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan pendapatan yang terjadi atas periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Pendapatan per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

Ekuitas Akhir

Rp41.509.746.820,00.

E.7. Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas Akhir per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing senilai Rp41.509.746.820,00 dan Rp42.659.595.624,00.

F. PENGUNGKAPAN –PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

F.1.1. Penjelasan SK Pejabat Pengelola Anggaran

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor KEP.21/MEN-KP/KU.611/2023 tanggal 17 Juli 2023 Tentang Perubahan Kelima Puluh atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.79/MEN/KU.611/2019 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Kantor Daerah (Unit Pelaksana Teknis) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan memutuskan bahwa :

- Ahmad Ridloudin, S.T., M.P selaku Direktur menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor KEP-234/BPPP.MDN/TU.110/I/2025 tanggal 23 Januari 2025 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar memutuskan bahwa :

- Andi Syahrial, S.Pi menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen

- Tika Ayu Ningrum, S.Pi menjabat sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor B-235/BPPP.MDN/KU.110/I/2025 tanggal 23 Januari 2025 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan memutuskan bahwa :

- Ismi Kurnia, A.Md., A.k menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran
- Fitri Indria Sari Lubis, SE menjabat sebagai Bendahara Penerimaan

F.2. TEMUAN DAN TINDAK LANJUT

Tidak ada temuan BPK

F.3. CAPAIAN OUTPUT ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN

Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN TA. 2025 pada Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan antara lain sebagai berikut :

LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA

TAHUN ANGGARAN 2024

Periode s.d Bulan	:	Juni 2025
Kementerian Negara/Lembaga	:	Kelautan dan Perikanan
Eselon 1	:	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan
Wilayah/Propinsi	:	Sumatera Utara
Satuan Kerja	:	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan

Laporan Keuangan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan Semester I TA 2025

LAPORAN REALISASI KINERJA Tahun Anggaran 2025																
Periode s.d bulan		: 2025-06	Kementerian Negara/Lembaga		: 032 - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Eselon 1		: 032.12 - BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Wilayah/Provinsi	: 07.51 - KOTA MEDAN/SUMATERA UTARA	Satuan Kerja	: 238741 - BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN MEDAN	Halaman	:	Tanggal Cetak	1 16-07-2025
Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN			GAP	Referensi	Keterangan						
		Pagu	Realisasi	Percentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO									
04	EKONOMI	69.954.144.000,00	36.309.415.229,00	51,9%												
03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	69.954.144.000,00	36.309.415.229,00	51,9%												
DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	8.697.664.000,00	3.212.313.819,00	36,93%												
2375	Pelatihan Kelautan dan Perikanan	3.344.918.000,00	20.127.319,00	0,6%												
DCC	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	18.000.000,00	0,00	0%												
431	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi	18.000.000,00	0,00	0%	30.000	Orang	0,0000	78%	78%	(01) Adanya efisiensi dan optimisasi anggaran						
RAL	Surase Bidang Kamaritiman, Kelautan, dan Perikanan	81.000.000,00	0,00	0%												
711	Pelatihan dan Mesin Pelatihan Kelautan dan Perikanan	81.000.000,00	0,00	0%	1.0000	Unit	0,0000	64%	64%	(01) Adanya efisiensi dan optimisasi anggaran						
SCC	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	3.245.918.000,00	20.127.319,00	0,62%												
831	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Dilatih	3.245.918.000,00	20.127.319,00	0,62%	3.154.000	Orang	0,0000	65,53%	64,91%	(01) Adanya efisiensi dan optimisasi anggaran						
7020	Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	5.352.746.000,00	3.192.186.500,00	59,64%												
Q00	Facilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	5.352.746.000,00	3.192.186.500,00	59,64%												
646	Kelompok Pelaku Usaha/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	5.352.746.000,00	3.192.186.500,00	59,64%	4.598.000	Kelompok Masyarakat	1.430.000,00	69,87%	10,23%	00 Pembayaran Honorarium Penyuluhan Perikanan Bantu Bulan Mei 2025						
WA	Program Dukungan Manajemen	61.256.480.000,00	33.097.101.410,00	54,03%												
2378	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	61.256.480.000,00	33.097.101.410,00	54,03%												
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	61.166.480.000,00	33.096.534.410,00	54,11%												
962	Layanan Umum	70.000.000,00	34.677.937,00	49,54%	1.0000	Layanan	0,0000	50,88%	1,34%	00 Efisiensi Anggaran						
994	Layanan Perkantoran	61.095.480.000,00	33.061.656.473,00	54,11%	1.0000	Layanan	0,0000	49,98%	-4,13%	00 Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui						
EBO	Layanan Manajemen Kinerja Internal	90.000.000,00	567.000,00	0,63%												
952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	40.000.000,00	0,00	0%	1.0000	Dokumen	0,0000	51,15%	51,15%	(01) Adanya efisiensi dan optimisasi anggaran						
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	30.000.000,00	0,00	0%	1.0000	Dokumen	0,0000	63,65%	63,65%	(01) Adanya efisiensi dan optimisasi anggaran						
955	Layanan Manajemen Keuangan	20.000.000,00	567.000,00	2,84%	1.0000	Dokumen	0,0000	65,65%	62,81%	(01) Adanya efisiensi dan optimisasi anggaran						

Kepala Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan
Medan



Ahmad Ridloudin, S.T., M.P.